

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pajak yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APDB) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Berikut merupakan ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat :

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya diperoleh di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah secara kuantitatif biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. (Lasminingsih, 2004 : 223).

Tabel 2.1

Komponen-Komponen APBD

| No | Penerimaan | Pengeluaran |
|----|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah 1) PAD <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah 2) Dana Perimbangan <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus • Dana Alokasi Umum 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah 4) Pembiayaan Daerah | Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Bagi Hasil • Belanja Bantuan Keuangan • Pengeluaran Tidak Terduga Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal • Pembiayaan Daerah |

Sumber : BPS. Penerimaan dan Pengeluaran (diolah)

APBD merupakan suatu tolak ukur dalam keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Dimana jika perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD (Saragih, 2005:127).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen sumber penerimaan keuangan negara dengan sumber penerimaan berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan yang sah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut dapat tercermin kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Walaupun PAD tidak dapat membiayai APBD, seperti yang telah dijelaskan oleh Santoso (1995:20) menjelaskan bahwa perbandingan PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu Pemerintah daerah. Sementara itu pengertian PAD menurut Baldric Siregar (2015:31) menjelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang didapatkan Pemerintah daerah dari sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah.

Dari pengertian tentang PAD disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi dalam suatu wilayah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. PAD yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai penerapan otonomi daerah yang sesuai. Untuk meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan adanya peningkatan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah disediakan.

Perekonomian makro menurut Dombush (1997:27) menjelaskan bahwa dalam ekonomi makro terdapat tiga unsur yakni Output, Pendapatan, dan Pengeluaran. Output pemerintah menurut Mangkoesobroto (2010:178) pemerintah menyimpan barang atau jasa untuk kebutuhan umum yang ditentukan oleh besaran jumlah pajak dari masyarakat. sedangkan arti pendapatan dalam suatu

daerah menurut Khusaini (2006:215-216) merupakan pendapatan yang memprioritaskan penerimaan modal dana tambahan dalam rentang waktu anggaran yang menjadi hak Pemerintah daerah dan tidak perlu melakukan pembayaran kembali.

Kemajuan suatu pemerintah sebagai pengelolaan negara, baik Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah ditentukan oleh kesanggupannya untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus meninjau bagaimana meningkatkan PAD yang merupakan instrumen bagi meningkatnya Pendapatan Asli Masyarakat (PMA). Menurut Halim (2007:96), PAD terdiri dari beberapa sumber penerimaan, yaitu :

1. Pajak daerah yang terdiri dari pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD

PAD sebagai penerimaan yang diterima oleh suatu daerah, dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan

ketergantungannya terhadap pemerintah pusat akan berkurang. Oleh karena itu apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah, tetapi PAD suatu daerahnya belum cukup dalam membiayai pembangunannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PAD diantaranya PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Belanja Modal.

2.1.4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam negara dalam satu tahun tertentu baik atas dasar berlaku maupun dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Barang dan jasa ini diproduksi bukan oleh perusahaan milik penduduk negara saja tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno, 2003:33). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dijelaskan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka akan mendorong peningkatan PAD (Saragih, 2003).

Pendapatan yang timbul dari kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik, dalam menentukan PDRB terdapat empat pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, metode alokasi. Dalam pandangan Adam Smith inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan populasi (Todaro, 2002). Dimana modal dan kemampuan pertumbuhan penduduk yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi penilaian pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB, diantaranya adalah bahwa PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan produksi dalam perekonomian (Mankiw, 2003).

Menurut pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semua sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian lainnya PDRB, kecuali faktor pendapatan termasuk pula komponen pendapatan persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB adalah jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha). Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan neoklasik dari Robert Solow yang mengemukakan bahwa secara kondisional perekonomian berbagai wilayah akan bertemu pada tingkat pendapatan yang sama, dengan syarat bahwa negara tersebut mempunyai tingkat tabungan,

depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan produktivitas yang sama (Todaro:2006).

Di dalam penelitian ini, akan mengkaji sejauh mana pengaruh PDRB Kab/Kota dalam mempengaruhi PAD di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini akan diambil seluruh penghasilan dari pajak daerah yang tertera dalam laporan PAD setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.1.4.2 Jumlah Penduduk

Menurut Marxist tekanan jumlah penduduk di suatu negara terjadi karena adanya tekanan terhadap kesempatan kerja. Semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi juga produk yang harus dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu adanya pembatasan penduduk. Dasar pegangan teori Marxist adalah pengalaman bahwa manusia selama sejarahnya akan dapat menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman.

Adam Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan jumlah penduduk merupakan hal yang dibutuhkan sebagai unsur penting yang dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan akan mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang akan diterima meningkat.

Selain itu menurut Karmer (2006) menjelaskan bahwa penduduk akan mempengaruhi pemerintah daerah, apabila kemajuan teknologi terjadi lebih cepat

pada suatu daerah dengan besarnya jumlah penduduk maka daerah dengan jumlah penduduk tersebut akan mengalami peningkatan pendapatan.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang dapat menunjukkan persentase bertambahnya jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Manfaatnya adalah dapat memperkirakan jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang. Rumus laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

Keterangan :

P_t : Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 : Jumlah penduduk pada tahun dasar

t : Jangka waktu

r : Laju pertumbuhan penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kelahiran

Tingkat kelahiran adalah frekuensi kelahiran hidup dalam suatu populasi. Tingkat kelahiran dapat mempengaruhi jumlah penduduk karena dengan adanya kelahiran, jumlah penduduk akan bertambah. Angka kelahiran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kelahiran} = \frac{\text{Jumlah kelahiran hidup} \times 1000}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2. Tingkat kematian

Angka kematian adalah frekuensi kematian suatu populasi. Kematian berarti berkurangnya jumlah penduduk dari suatu daerah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kematian} = \frac{\text{Jumlah Kematian} \times 1000}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Tingkat migrasi/Perpindahan penduduk

Migrasi adalah perpindahan tempat tinggal suatu individu dalam jangka waktu yang cukup panjang.

2.1.4.3 Inflasi

Teori Keynes mengatakan proses inflasi adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok sosial yang menginginkan bagian yang besar dari pada yang disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi ini adalah terjadinya karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya sehingga dapat menyebabkan permintaan efektif masyarakat. Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para pemilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang tahan lama seperti rumah, tanah dan gedung karena hal ini lebih menguntungkan dari pada investasi produktif. Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilakukan kebijakan fiskal sebagai berikut : Mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah tingkat pajak, dan pinjaman paksa.

Inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan uang sebagian dari pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer. Pemerintah dapat mendanai pengeluarannya dalam tiga cara yaitu : Pertama, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan lewat pajak. Kedua, pemerintah dapat meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Ketiga, pemerintah dapat dengan mudah mencetak uang. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan masalah yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah. selain itu inflasi juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD (Mankiw, 2006:87).

Secara umum, inflasi rendah dapat diterima, bahkan dalam tingkat tertentu dapat mendorong perkembangan ekonomi. Dengan harga yang semakin tinggi, menjadikan pendapatan produsen meningkat. Peningkatan biaya produksi tidak secepat kenaikan harga. Dengan demikian, kenaikan harga produk berarti juga mendorong peningkatan laba produsen. Di sisi lain inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat turun, tetapi tidak signifikan. Idealnya inflasi dihitung berdasarkan kenaikan semua harga barang dan jasa, tetapi karena masalah kepraktisan, perhitungan inflasi didasarkan atas sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.

Badan Pusat Statistik mengelompokkan 744 komoditas yang dikonsumsi masyarakat Indonesia menjadi 7 kategori, yaitu : 1) Bahan makanan, 2) Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, 3) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan

bakar, 4) Sandang, 5) Kesehatan, 6) Pendidikan, 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

1. Penggolongan Inflasi

Menurut Boediono, (1998:162) inflasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Inflasi Ringan : < 10% per tahun
2. Inflasi Sedang : 10-30% per tahun
3. Inflasi Berat : 30-100% per tahun
4. Hiperinflasi : $\geq 100\%$ per tahun

2. Menentukan Tingkat Inflasi

Untuk menentukan tingkat inflasi perlu memperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu periode tertentu dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang digunakan dalam menentukan laju inflasi menurut Suharyadi dan Purwanto (2003:152) sebagai berikut :

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (Tahun sebelumnya)

2.1.4.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan dari aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode waktu akuntansi (Halim,2010:101). Menurut Darise (2010:141) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam pembelian, pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai yang manfaatnya lebih dari dua belas bulan untuk dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

Tabel 2.2

Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam belanja modal menurut SAP

| No | Jenis Belanja Modal | Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Belanja Modal Tanah | <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Modal Pembebasan Tanah2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah4. Belanja Modal Pengurangan Dan Pematangan Tanah5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 2. | Belanja modal gedung dan bangunan | <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung Dan Bangunan2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung Dan Bangunan4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan5. Belanja Modal Perizinan Gedung Dan Bangunan6. Belanja Modal Pengosongan Dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung Dan Bangunan7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung Dan Bangunan |
| 3. | Belanja modal peralatan dan mesin | <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan Dan Mesin2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Peralatan Dan Mesin |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Belanja Modal Sewa Peralatan. Peralatan Dan Mesin 4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Peralatan Dan Mesin 5. Belanja Modal Perizinan Peralatan Dan Mesin 6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan Dan Mesin 7. Belanja Mesin Perjalanan Peralatan Dan Mesin |
| 4. | Belanja modal jalan. irigasi. dan jaringan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan Dan Jembatan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Jalan Dan Jembatan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan Dan Jembatan 4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan 5. Belanja Modal Perizinan Jalan Dan Jembatan 6. Belanja Modal Pengosongan Dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan Dan Jembatan 7. Belanja Modal Perjalanan Jalan Dan Jembatan 8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi Dan Jaringan 9. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Irigasi Dan Jaringan 10. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi Dan Jaringan 11. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Irigasi Dan Jaringan 12. Belanja Modal Perizinan Irigasi Dan Jaringan 13. Belanja Modal Perjalanan Irigasi Dan Jaringan |
| 5. | Belanja modal fisik lainnya | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Fisik Lainnya 5. Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6. Belanja Jasa Konsultan Fisik Lainnya. |

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya yang menjadi komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang bersifat dapat menambah aset tetap yang dapat memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pemendagri No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah komponen dari belanja langsung yang merupakan bagian dari belanja daerah dan dibiayai oleh pendapatan daerah, maka besar

kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendapatan daerah berupa PAD (PAD). Pemerintah pusat juga akan mentrasfer Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah. Kontribusi PAD dalam mengalokasikan anggaran cukup besar

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Zulfatun Nisa dan Fitri Bahari, (2019) <i>“Effect of Regional Tax, Population, and GRDP on Original Local Government Revenue (PAD) in the Regency/City of Central Java Province”</i> | Hasil penelitian menjelaskan bahwa pajak dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah. | Variabel independen : Jumlah penduduk, PDRB Variabel dependen : PAD. Dalam Penelitian terdahulu metode pengumpulan datanya menggunakan data panel. | Tidak menggunakan pajak, penelitian ini di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di penelitian ini lokasi penelitian di Jawa Barat dan pada tahun 2010-2020. |
| 2. | Rahmad. T. Zulham, dan Chenny Seftarita, (2019). | Hasil penelitian menjelaskna bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Inflasi | Variabel independen : | Penelitian Kota Aceh. Tempat dan tahun penelitian berbeda. |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | <p><i>“The Analysis Of Local Revenues And The Affecting Factors In The Implementation Of Regional Autonomy In Aceh Province”</i></p> | <p>berpengaruh negatif terhadap PAD. Sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.</p> | <p>Jumlah penduduk, Inflasi, PDRB</p> <p>Variabel dependen : PAD</p> <p>Dalam Penelitian terdahulu metode pengumpulan datanya menggunakan data panel.</p> | |
| 3. | <p>Indra Randy Weley. Anderson G. Kumenang. Jacline I. Sumual, (2016)</p> <p>“Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap PAD Di Kota Manado”</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Manado. Sedangkan variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Manado.</p> | <p>Variabel independen : Inflasi, PDRB</p> <p>Variabel dependen : PAD.</p> | <p>Lokasi penelitian di Kota Manado. Tempat dan tahun penelitian berbeda.</p> |
| 4. | <p>David Kaluge, Nanang Setiawan, dan Wawan Dwi Prastyo Hutomo, (2019)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan PDRB tidak mempengaruhi PAD Kota Malang, namun hanya memiliki korelasi terhadap PAD.</p> | <p>Variabel independen : Inflasi dan Jumlah Penduduk, PDRB</p> | <p>Lokasi penelitian ini di Kota Malang. Tempat dan tahun penelitian berbeda.</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | “Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Di Kota Malang” | Variabel yang memiliki pengaruh terhadap PAD hanya jumlah penduduk. | Variabel dependen : PAD. | |
| 5. | Dimas Priyono dan Herniwati Retno Handayani, (2021) “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap PAD Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018” | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk memiliki pengaruh paling tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel PDRB, Jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. | Variabel independen : Inflasi dan Jumlah Penduduk, PDRB Variabel dependen : PAD. | Lokasi penelitian ini di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. Tempat dan tahun penelitian berbeda. |
| 6. | Agung Pramarta dan Luh Putu Aswitari. (2018) “Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Di Provinsi Bali” | Hasil penelitian uji f menunjukkan bahwa retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan pada uji t menunjukkan bahwa hanya pajak daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan retribusi daerah dan jumlah penduduk | Variabel independen : Jumlah penduduk Variabel dependen : PAD. | Tidak terdapat variabel retribusi daerah dan pajak daerah. Kota penelitian Provinsi Bali. Tempat dan tahun penelitian berbeda. |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. | | |
| 7. | Karlina Batik. (2013) “Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat” | Hasil penelitian menjelaskan bahwa Investasi, PDRB, Penerimaan Pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan jumlah penduduk dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. | Variabel independen : Jumlah Penduduk, dan Inflasi, PDRB. Variabel dependen : PAD | Tidak terdapat variabel investasi, dan Penerimaan Pembangunan. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan, juga akan mendorong meningkatnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. PDRB merupakan pembagian dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan diperoleh suatu PDRB perkapita. PDRB yang mengalami peningkatan cenderung akan mempengaruhi tenaga kerja yang akan diserap. Apabila upah tenaga kerja lebih tinggi maka hal tersebut secara tidak langsung akan menaikkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk membayar pajak dan retribusi daerah hal tersebut akan menambah sumber PAD (Mankiw, 2002:19).

Jumlah penduduk dengan kualitas penduduk suatu daerah merupakan bagian yang paling penting untuk kemampuan produksi dan standar hidup suatu negara. Namun, mengapa masalah penduduk sangat menarik bagi pakar ekonomi karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja, human resource (Rosyidi, 2002:87). Apabila suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang sedikit maka penduduk tersebut tidak akan mampu memanfaatkan sumbernya dengan efisien. Apabila suatu wilayah memiliki penduduk yang over population, maka penduduk dapat memanfaatkan modal tanah dengan sangat efisien, tetapi karena penduduknya terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap individu akan menjadi sangat kecil (Rosyidi,2002:92).

Berdasarkan Teori Marxist tekanan penduduk di suatu negara terjadi karena adanya tekanan terhadap kesempatan kerja. Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia maka semakin tinggi juga produksi yang dihasilkan. Ketika hasil produksi suatu negara tinggi akan mempengaruhi pendapatan suatu negara. Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu wilayah. Jumlah penduduk dengan PAD yaitu ketika Pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak dapat mempengaruhi pendapatan secara proposional (Atmaja, 2007).

Inflasi merupakan suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Menurut definisi tersebut kenaikan harga yang sporadic dikatakan bukan inflasi (Anckley, 1999:213). Dari berbagai negara yang telah mengalami inflasi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar, upah, krisis energy, kekeringan dan defisit anggaran. Tetapi tidak ada satupun faktor yang mampu menjelaskan secara konsisten apa itu inflasi.

Teori Mankiw menjelaskan bahwa inflasi akan mempengaruhi pendapatan Permerintah daerah serta pengeluaran pemerintah. Mankiw mengutarakan bahwa seluruh Pemerintah pusat ataupun Pemerintah daerah mengeluarkan uang sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah. dan kepentingan publik), dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer. Pemerintah dapat membiayai pengeluarannya dalam tiga cara yaitu : pemerintah dapat meningkatkan penerimaan lewat pembayaran pajak seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan, pemerintah dapat

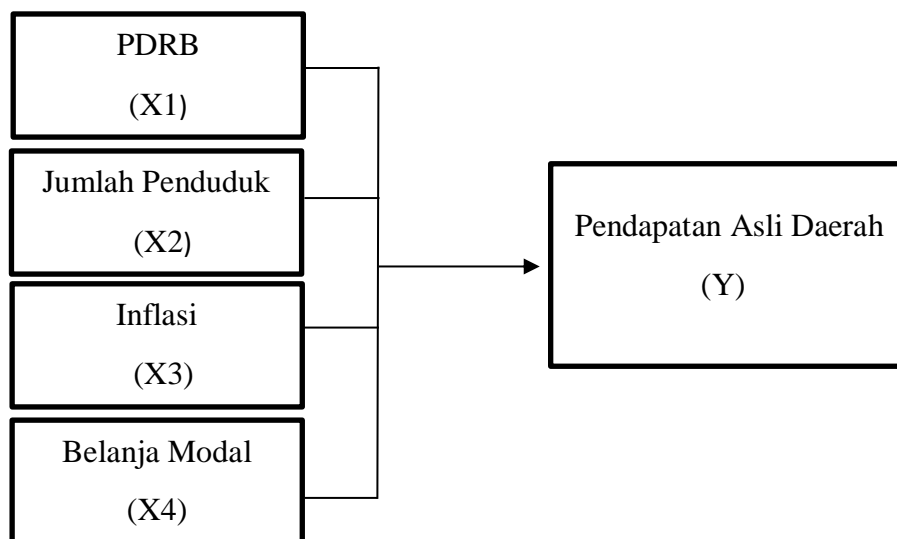
meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah, dan pemerintah dapat dengan mudah mencetak uang.

Tingginya inflasi akan berakibat terhadap rendahnya jual beli masyarakat. Jika inflasi rendah maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Dengan demikian disimpulkan bahwa Inflasi sangat berpengaruh terhadap PAD. Suatu daerah untuk dapat menambahkan aset tetap daerahnya berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, sehingga Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik sebagai upaya dalam meningkatkan PAD. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002).

PAD adalah sumber pembelanjaan daerah. Maka ketika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat, sehingga Pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali kemampuan daerah (Tambunan, 2006). Belanja modal berpengaruh terhadap PAD. Faktor yang mempengaruhinya adalah masyarakat yang membayar retribusi dan pajak, bagaimana cara Pemerintah daerah dalam hal mengelola Belanja Modal untuk dapat membangun daerahnya. Dengan penggunaan Belanja Modal yang efektif dan efisien, fasilitas umum seperti jalan raya dan taman hiburan dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat akan dengan

mudah membayar retribusi dan pajak sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap Pemerintah daerah. Dalam bukunya Abdul Halim (2004:73) menjelaskan bahwa belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menyebabkan konsekuensi dalam menambah belanja yang bersifat rutin. Hal tersebut menunjukkan suatu hubungan yang kuat bahwa ketika pengeluaran Belanja Modal suatu daerah tinggi maka PAD suatu daerah mengalami peningkatan

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan belanja modal terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Variabel bebas yang akan diteliti adalah PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal. Sedangkan variabel terikatnya adalah PAD.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

Dari permasalahan dan alur kerangka pemikiran. maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. PDRB diduga berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Jumlah penduduk diduga berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Inflasi diduga berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Belanja Modal diduga berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.